

## **ABSTRAK**

### **Fajar Muhamad Sidik: Pengawasan Kinerja Pemerintahan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung**

Badan Permusyawaratan Desa ialah salah satu lembaga desa bergerak serta berfungsi mengawasi jalannya kinerja pemerintahan desa. Pengawasan sangat diperlukan untuk menjaga agar pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan desa (BPD) yang memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja pemerintahan desa bertujuan agar kinerja pemerintah desa dapat lebih baik dan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sehingga peran BPD dalam rangka mengawasi kinerja pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa Cibiru Hilir dan apa yang menjadi faktor penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik-teknik pengawasan menurut Siagian (2014 : 115) untuk melaksanakan pengawasan membutuhkan teknik-teknik agar dapat berjalan dengan baik diantaranya yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya observasi, wawancara, dokumen, dan bahan audio-visual. Teknik analisis data yang digunakan yaitu mengolah dan mempersiapkan data, membaca seluruh data, memberikan kode pada data, menerapkan Coding untuk mendeskripsikan *setting* (lingkungan atau ranah), partisipan, kategori, dan tema penelitian, penyajian data, serta interpretasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Cibiru Hilir dalam mengawasi kinerja pemerintah desa belum berjalan optimal. Hal ini karena dalam pengawasan langsung yaitu dalam indikator pengarahan pekerjaan, BPD Desa Cibiru Hilir sudah melaksanakan pengarahan pekerjaan pemerintah desa namun dalam hal ini BPD tidak diberikan ruang atau wadah secara penuh karena pendapat dan masukan dari BPD tidak ditanggapi oleh pemerintah desa. Sehingga pengawasan secara langsung oleh BPD Desa Cibiru Hilir sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Kemudian dalam pengawasan tidak langsung yaitu pada indikator laporan secara berkala belum dijalankan dengan baik, hal ini diketahui bahwa BPD Desa Cibiru Hilir membuat laporan tidak secara berkala. BPD Desa Cibiru Hilir menunggu laporan kinerja pemerintah desa kepada BPD. Sehingga dalam hal ini BPD kurang aktif dalam membuat laporan secara berkala. Kemudian faktor penghambat BPD Desa Cibiru Hilir dalam melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah desa yaitu dalam pengawasan langsung, BPD tidak diberikan wadah atau keleluasaan secara penuh dan dalam pengawasan tidak langsung masih kurangnya kesadaran pemerintah desa untuk selalu membuat laporan hasil pekerjaan salah satunya LPJ.

**Kata Kunci : Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kinerja Pemerintah Desa**

## **ABSTRACT**

**Fajar Muhamad Sidik:** *Supervision of Village Government Performance by the Village Consultative Body (BPD) at the Cibiru Hilir Village Office, Cileunyi District, Bandung Regency*

Village institutions and functions to oversee the performance of the village government. In this case, the Village Consultative Body (BPD) which has a function as a supervisor for the performance of the village government aims to improve the performance of the village government and the realization of good governance. So that the role of the BPD in monitoring the performance of the village government is very important to note.

The purpose of this research is to find out how the Village Consultative Body (BPD) monitors the performance of the Cibiru Hilir Village Government and what are the inhibiting factors for the Village Consultative Body (BPD) in carrying out their duties and functions.

The theory used in this research is the supervision techniques according to Siagian (2014: 115) to carry out supervision requires techniques to run well including direct supervision and indirect supervision

The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used include observation, interviews, documents, and audio-visual materials. The data analysis technique used is to process and prepare data, read all data, code the data, apply coding to describe the setting (environment or realm), participants, categories and research themes, data presentation, and interpretation.

The results showed that the BPD of Cibiru Hilir Village in supervising the performance of the village government had not run optimally. This is because in direct supervision, namely in the work direction indicators, the Cibiru Hilir Village BPD has carried out the village government's work direction but in this case the BPD is not given full space or container because the opinions and inputs from the BPD are not responded to by the village government. So that direct supervision by the BPD of Cibiru Hilir Village has been going well but not yet optimal. Then in indirect supervision, namely the indicators of periodic reports that have not been carried out properly, it is known that the BPD of Cibiru Hilir Village makes reports not regularly. The BPD of Cibiru Hilir Village is waiting for the village government's performance report to the BPD. So in this case the BPD is less active in making periodic reports. Then the inhibiting factor of the Cibiru Hilir Village BPD in carrying out monitoring of the village government's performance is in direct supervision, the BPD is not given full scope or flexibility and in indirect supervision there is still a lack of awareness of the village government to always make reports on the results of work, one of which is LPJ.

**Keywords:** *Supervision, Village Consultative Body (BPD), Village Government Performance*